

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Gunanegara. 2016. *Hukum Pidana Agraria*. Jakarta: Tata Nusa.

Harsono, Boedi. 2006. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Agraria. Isi dan Pelaksanaanya*. Jilid I, Edisi Revisi, Jakarta: Djambatan.

-----, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Cet. 17, Edisi Revisi. Jakarta: Djambatan

Hutagalung, Arie Sukanti dan Markus Gunawan. 2008. *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hutagalung, Arie Sukanti, et.al, ed. 2012. *Hukum Pertanahan di Indonesia dan Belanda*. Denpasar: Pustaka Larasan.

Lasmoraha. 2002. *Tinjauan Mengenai Lembaga Daluwarsa Pada KUHPerdara dan UUPA*. Skripsi. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 1993. *Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Sibuea, Harris Yonathan Parmanahan. 2009. *Tinjauan Terhadap Ketidakpastian Hukum Status Tanah Milik Adat Dengan Bukti Girik (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 311/PDT/2004/ PT DKI)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Sihombing, B.F. 2004. *Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12

Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan

Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang

Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atas Kuasanya

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden

Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas

Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Nomor 210/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR

Putusan Nomor 223/PDT/2014/PT.DKI

Putusan Nomor 2459K/Pdt/2014

WEB

<https://www.scribd.com/doc/100724313/Studi-Kasus-Sengketa-Tanah>, diakses pada tanggal 24 september 2019.

http://derryjie.blogspot.co.id/2013/11/makalah-sengketa-lahan_26.html, diakses pada tanggal 30 September 2019.

<https://maspurba.wordpress.com/2008/04/29/kepastian-hukum-atas-sertifikat-tanah-sebagai-bukti-hak-kepemilikan-atas-tanah/>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2019.

<http://lawlowlew.blogspot.co.id/2013/07/hukum-agraria-kasus-dan-analisis.html>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2019.